

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Kasus pada PEMDA Grobogan periode 2006-2008)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SWASTIKA SEPTIYANTI M P

B200050136

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No 32 tahun 2004 bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai revisi dari UU No 25 tahun 1999 dari UU tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Dalam meningkatkan kemandirian daerah maka pemerintah daerah harus berupaya menggali dan meningkatkan sumber keuangan dan untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau

penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Peningkatan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. Dalam menggunakan pendapatan yang melimpah terdapat juga kesulitan dalam mengalokasikan sumber pendapatan yang terbatas yang dihadapkan pada bagaimana memperbesar sumber-sumber yang akan dialokasikan dan darimana sumber-sumber itu diperoleh.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tidak ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (*service delivery*) pemerintah daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tetapi masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan akan lebih berperan sebagai fasilitator sekaligus evaluator kepada seluruh pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, dan kota) atas pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dan sedang berjalan.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu diadakan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal. Otonomi desentralisasi fiskal (*local fiscal autonomy*) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis mengambil judul : “ **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Pada PEMDA Grobogan periode 2006 - 2008)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan jika dilihat dari analisis otonomi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Grobogan pada aspek derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal atau posisi fiskal pada tahun anggaran 2006-2008?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008 yang diukur dengan derajat otonomi fiskal pemerintah Kabupaten Grobogan pada aspek derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal atau posisi fiskal pada tahun anggaran 2006-2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi instansi pemerintahan daerah tingkat kabupaten Grobogan dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerahnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. Bagi semua elemen masyarakat yang ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, dapat berperan aktif dengan ikut serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang demokratis.
3. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintah sesuai dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah, tinjauan tentang kemandirian daerah, desentralisasi fiskal daerah, keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dengan tolok ukurnya serta tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang keadaan umum daerah di kabupaten Grobogan, dan membahas analisis data yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan analisis data dan Saran yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten Grobogan dan keterbatasan penelitian.